

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepariwisataan pada hakikatnya bertumpu pada keunikan, kekhasan dan kelokalan serta keaslian objek wisata, sehingga harus dapat menempatkan keanekaragaman sebagai suatu hal yang prinsip dan hakiki, oleh karena itu maka pengembangan kepariwisataan pada dasarnya untuk kelestarian dan memperkuat jati diri bangsa serta lingkungan alam. Pengembangan kepariwisataan di berbagai daerah di Indonesia harus tetap menjaga terpeliharanya kepribadian dan budaya bangsa, terlindunginya kepemilikan aset masyarakat setempat, tertangkalnya dampak negatif, serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup.¹

Hutan mangrove merupakan salah satu potensi wisata bahari yang dimiliki Indonesia dengan luas hutan mangrove yang termasuk paling besar di dunia.²Potensi besar ini sejalan dengan peluang pengembangan ekowisata terutama yang berkaitan dengan pelestarian mangrove. Hal ini di dukung sebagaimana ekowisata merupakan bagian dari industri pariwisata yang memanfaatkan sumber daya lokal dan secara langsung memberi akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui, serta menikmati pengalaman alam, intelektual dan budaya masyarakat lokal. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang

¹Muljadi A.J.(2009)*Kepariwisataan dan perjalanan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 26-27

²Franka Hendra,dkk (2020), *Pemberdayaan potensi hutan mangrove sebagai industri ekowisata untuk meningkatkan prekonomian masyarakat Pulau Untung Jawa*. Jurnal pengabdian kepada masyarakat. Vol.1.No.1, hlm 109

berkontribusi terhadap kegiatan konservasi alam dan budaya dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaannya.³ Menurut I Nyoman Sukma Arida beberapa keunggulan ekowisata diantaranya

“Konsep ekowisata ini muncul sebagai suatu konsep *alternative tourism* yang memberikan kritikan terhadap paradigma lama tentang kepariwisataan yang melakukan pembangunan besar-besaran dengan dicirikan pertumbuhan yang cepat, eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestariannya, dan marginalisasi kepentingan masyarakat lokal. Adanya upaya-upaya konservasi alam yang dapat menjadikannya sebagai objek wisata, area rekreasi, tempat penelitian dan pembelajaran sekaligus menjaga kawasan konservasi secara berkelanjutan untuk masa yang akan datang merupakan bagian dari keunggulan ekowisata.”⁴

Untuk mendukung upaya pengembangan pariwisata hutan mangrove dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pelestarian alam, kebijakan pengelolaan mangrove di Indonesia telah diatur dalam beberapa Peraturan yakni, pada tingkat Nasional diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2012 tentang strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, melalui peraturan ini ditekankan tujuan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove, pentingnya upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat dan diatur pula tentang pengelolaan terpadu lintas sektor dan lembaga dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

“Pada tingkat provinsi Gubernur menetapkan strategi pengelolaan ekosistem mangrove tingkat provinsi dan membentuk tim koordinasi strategi pengelolaan ekosistem mangrove tingkat Provinsi. di tingkat Kabupaten Bupati/Walikota menetapkan strategi pengelolaan

³Dadan Zulkifli.(2018).*Konsep pengembaganan ekowisata*, <https://swarapendidikan.co.id/>
Di akses pada 11 Oktober 2021, Pkl 09:30

⁴I Nyoman Sukma Arida (2017), *Ekowisata, pengembangan, partisipasi lokal, dan tantangan ekowisata*, Bali, Cakra Press, hlm 15

ekosistem mangrove tingkat Kabupaten/kota dengan membentuk kelompok kerja mangrove tingkat Kabupaten/Kota.”⁵

Pada tingkat Provinsi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jambi Tahun 2019-2039 juga mengatur mengenai perlindungan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan potensi lestari, Pada pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa :

“Strategi untuk mewujudkan perlindungan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan potensi lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :a. menetapkan kawasan konservasi perairan serta konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;b. mengembangkan kawasan dan ekowisata mangrove yang berbasis masyarakat secara intensif untuk meningkatkan potensi lestari kawasan;c. meningkatkan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemkhususnya dari abrasi; dand. meningkatkan pengawasan, perlindungan, dan pelestarian biota yang dilindungi.”⁶

Pada tingkat Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup yang harus benar-benar memerlukan perhatian pada seluruh pelaku pembangunan, terkait pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah dan perlu dilindungi serta dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan

⁵Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2012 tentang strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Pasal 9-10

⁶Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jambi Tahun 2019-2039

pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi antara laut, darat dan udara.⁷ Selain itu dalam Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013-2033 telah mengatur dalam hal pengembangan kawasan pariwisata haruslah memperhatikan keaslian/keunikan pariwisata serta pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata.⁸

Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai total luas wilayah 5.375,16 km². Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2017), menyatakan bahwa sekitar 556 ha dari luas tersebut merupakan hutan mangrove. Sebagian besar daerah Tanjung Jabung Barat adalah daerah mangrove karena daerah tersebut merupakan daerah pasang surut, sehingga tumbuhan mangrove dapat hidup dengan baik di kawasan tersebut. Salah satu daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang banyak ditumbuhi tumbuhan mangrove adalah Pangkal Babu, yang merupakan bagian dari Desa Tungkal 1 Kecamatan Tungkal Ilir, Provinsi Jambi. Pangkal babu merupakan daerah pasang surut sehingga banyak ditumbuhi oleh tumbuhan mangrove.

Ekowisata Mangrove Pangkal Babu terletak di Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dengan luas hutannya sekitar 200 ha. Pengembangan ekowisata di Desa Tungkal Satu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan hutan mangrove menjadi objek

⁷Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013-2033

ekowisata. Upaya itu dilakukan melalui APBD 2019 yang juga di dukung oleh kementerian pariwisata melalui dana alokasi khusus 2019, melalui dana tersebut sudah dibangun untuk sejumlah fasilitas pendukung di dalam kawasan hutan mangrove Pangkal Babu, antara lain berupa akses jalan panggung dari kayu yang memberi peluang wisatawan menjelajahi eksotiknya alam hutan mangrove.⁹Namun berdasarkan kondisi fisiknya, kawasan ekowisata hutan mangrove yang berada di Desa Tungkal I ini masih belum terkelola dengan optimal dalam menunjang kegiatan ekowisata tersebut. Ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana pelengkap atau pendukung dari kegiatan ekowisata tersebut yang masih belum optimal, misalnya dilihat dari kondisi di lapangan masih banyak masalah seperti akses jalan yang sangat sulit dijangkau, dan beberapa fasilitas yang telah dibangun tidak terawat sehingga menjadi lapuk dan rusak.

Saat ini, kondisi ekosistem mangrove di Indonesia juga sedang terancam akibat laju deforestasi dan degradasi lahan mangrove yang begitu cepat. Indonesia telah kehilangan sebagian besar mangrovenya, sehingga perlu upaya serius untuk melindungi kawasan mangrove yang tersisa dan merehabilitasi kawasan yang telah mengalami degradasi.¹⁰Upaya pengembangan mangrove yang dilakukan pemerintah Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari arah kebijakan yang dibuat dengan memaksimalkan fungsi ekologis, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial kawasan mangrove. Selain itu

⁹Solmi, (2021). *Peduli ekowisata, polisi lestarikan mangrove pesisir timur.* <https://m.mediaindonesia.com/>. Diakses pada 1 november 2021 pkl 09:30

¹⁰Rignolda Djamaluddin. (2018) *Mangrove (biologi, ekologi, rehabilitasi, dan konservasi)*, Manado : Unsrat Press hlm 4

dalam upaya pelestarian hutan mangrove pemerintah memberikan sosialisasi tentang fungsi hutan mangrove untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹¹

Meskipun demikian data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) di Kecamatan Tungkal Ilir menunjukkan penurunan luas mangrove terus terjadi, di tahun 1989 luas mangrove dengan kerapatan tinggi adalah 484,25 hektar, kemudian di tahun 2000 menurun menjadi 265,76 hektar, sedangkan di tahun 2018 hanya tersisa 92,75 hektar.¹² Rizky Sigit menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab penurunan luas hutan mangrove yaitu disebabkan oleh berbagai faktor seperti konversi lahan budidaya pertanian (kebun kelapa, tambak), pemukiman, pembangunan infrastruktur (jalan, dermaga), semakin banyak jumlah warga yang mengeksploitasi mangrove untuk kepentingan ekonomi seperti penebangan kayu untuk dijadikan kayu bakar, pembuatan arang hingga konstruksi bangunan.¹³

Tabel 1.1
Perubahan Kerapatan Mangrove Sebagian Pesisir Provinsi Jambi

| | Kecamatan | Tahun | Luas (ha) | | |
|---|--------------|-------|-----------|--------|--------|
| | | | Jarang | Sedang | Rapat |
| 1 | Tungkal Ilir | 2018 | 44.30 | 492.62 | 92.75 |
| | | 2000 | 79.73 | 52.94 | 256.76 |
| | | 1989 | 24.36 | 15.28 | 484.25 |
| 2 | Kuala Betara | 2018 | 15.18 | 151.16 | 57.51 |
| | | 2000 | 21.50 | 16.12 | 167.72 |
| | | 1989 | 14.57 | 6.47 | 420.84 |

¹¹Gatracom (2019). *Kemenko kemaritiman tertarik kembangkan Tanjung Jabung Barat jadi pusat mangrove*. <https://www.gatra.com/>. Diakses pada 28 oktober 2021 pkl: 10:12

¹²Eva Ahmad(2020) *Studi kerapatan mangrove dan perubahan garis pantai tahun 1989-2018 di pesisir Provinsi Jambi*. *Jurnal of nature resources and environmental managemen* vol 10, hlm 144

¹³Ridzki sigit (2021). *Pangkal Babu: upaya jaga mangrove dan ancaman hilangnya pesisir timur sumatra*. <https://www.gogle.com/amp/s/www.mongabay.co.id/>. Diakses pada 28 oktober 2021 pkl: 10:10.

| | | | | | |
|---|-------------|------|--------|----------|----------|
| 3 | Mendahara | 2018 | 47.61 | 917.82 | 638.91 |
| | | 2000 | 105.09 | 174.17 | 873.15 |
| | | 1989 | 34.12 | 45.19 | 1 208.44 |
| 4 | Kuala Jambi | 2018 | 35.72 | 397.50 | 330.99 |
| | | 2000 | 77.20 | 73.08 | 215.53 |
| | | 1989 | 43.75 | 46.60 | 426.08 |
| 5 | Sabak Timur | 2018 | 191.93 | 1 178.87 | 649.49 |
| | | 2000 | 62.88 | 89.16 | 744.83 |
| | | 1989 | 40.19 | 42.58 | 1 542.02 |

Sumber : Jurnal of natural resources and environmental management

Persoalan ini menunjukkan ancaman kerusakan ekosistem mangrove masih menjadi persoalan serius yang harus ditanggulangi, untuk itulah penelitian inidilakukan untuk mengetahui strategi pengembangan ekowisata Pangkal Babu di Desa Tungkal I serta dampak ekowisata ini terhadap pengembangan dan pelestarian lingkungan.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian yang terkait dengan topik penelitian yaitu mengenai pengembangan ekowisata dan pelestarian lingkungan. Pertama, penelitian yang dilakukan Dinda Febriana dengan judul Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Berbak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya pemerintah mengembangkan ekowisata Taman Nasional Berbak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui ketepatan anggaran dan Sumber

¹⁴Dinda Febriana (2021) Skripsi : *Upaya pemerintah dalam mengembangkan ekowisata Taman Nasional Berbak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Jambi : UIN Jambi, diunduh dari <http://repository.uinjambi.ac.id> pada 19 Desember 2021 pukul 09:02

daya manusia mengalami hambatan karena kurangnya kerjasama dengan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada upaya pengembangan ekowisata melalui daya dukung anggaran dan sumber daya manusia. Sedangkan penulis menekankan penelitian pada upaya pengembangan ekowisata mangrove dengan perhatian khusus terhadap pelestarian hutan mangrove.

Selanjutnya penelitian Shazim dkk dengan judul *Creating an innocous mangrove ecosystem : Understanding the influence of ecotourism products from Malaysian and international prespectives* yang menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memastikan ekowisata tetap relevan seiring waktu yang memiliki kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional negara tanpa merusak alam dan ekosistem mangrove. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan tentang produk ekowisata berupa produk fisik, aktivitas wisatawan, fasilitas dan pelayanan tidak menjadi ancaman bagi ekosistem mangrove.¹⁵Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah fokus kajian dalam penelitain yang lebih spesifik menjelaskan karakteristik hutan mangrove berupa keunikan dan memiliki potensi dalam peningkatan ekonomi negara yang dalam pengembangannya harus memperhatikan ekosistem mangrove agar tetap terjaga dan terlindungi dengan baik. Sedangkan penelitian penulis mengkaji

¹⁵Shazmin Shareena Ab. Aziz dkk (2021)*Creating an innocous mangrove ecosystem : Understanding the influence of ecotourism products from Malaysian and international prespectives*. Journal ocean and coastal management Vol. 165. 2018, hlm 416-427, diunduh dari <https://sciencedirect.com> pada 20 November pukul 20:49

tentang pengembangan ekowisata dalam konteks potensi pengembangan wisata di daerah.

Selanjutnya Penelitian Idazati dkk dengan judul *The level of participation in mangrove ecotourism development*, Wonorejo Surabaya menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan ekowisata di Wonorejo dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yaitu organisasi ekowisata Wonorejo dan organisasi *Community Police Communication Forum* (FKPM), ekowisata mangrove yang diprakarsai dan dikelola oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk pengelolaan ekowisata ini ternyata mengakibatkan penyusunan, pengelolaan dan pengawasan hanya melibatkan sekelompok orang saja dan hal inilah yang menyebabkan tingkat partisipasi dalam pengembangan ekowisata masih dianggap kurang maksimal.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah penelitian memfokuskan tingkat partisipasi komunitas masyarakat dalam upaya pengembangan ekowisata mangrove di Kecamatan Wonorejo sedangkan penelitian penulis akan membahas pengembangan ekowisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya penelitian Bayu Aji dengan judul Penerapan Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui

¹⁶Hertiari Idajati dkk (2016), *The level of participation in mangrove ecotourism development, Wonorejo Surabaya*. *Journal Procedia-Social and Behavioral Sciences*. Vol. 227, hlm 515-520, diunduh dari <https://sciencedirect.com> pada 20 November 2021 pukul 20:34

observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada formulasi, implementasi, dan evaluasi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Desa wisata Mrojo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi strategi yang disusun dalam mengembangkan ekowisata meliputi pengembangan fasilitas, dan sarana prasarana, Implementasi dilakukan melalui penambahan wahana dan fasilitas wisata, serta evaluasi pengembangan fasilitas sarana dan prasarana supaya pelayanan terhadap wisatawan lebih maksimal dengan adanya pemberdayaan sumber daya manusia. Penelitian ini melihat dari sisi strategi pengembangan ekowisata yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat melalui tahap formulasi, implementasi dan evaluasi sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada pengembangan ekowisata sebagai bentuk kreatifitas daerah dalam lingkup pelestarian lingkungan.

Penelitian oleh Joandani dkk dengan judul kajian potensi pengembangan ekowisata sebagai upaya konservasi mangrove di Desa Pasar Banggi, Kabupaten Rembang dengan menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan pengumpulan data dilakukan melalui survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan ekowisata diantaranya keragaman jenis mangrove, kualitas SDM dalam menangani wisatawan, ketersediaan SDA berkualitas untuk ekosistem dalam upaya konservasi, kebijakan dari pemerintah daerah, terkait

¹⁷Bayu Aji (2021) Skripsi : *Penerapan strategi pengembangan ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar*. Tulungagung : IAIN Tulungagung, diunduh dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id> pada 19 Desember 2021 pukul 08:23

peraturan serta perundang-undangan tentang ekowisata hutan mangrove. Untuk itu rekomendasi yang menjadi prioritas utama adalah peningkatan pengembangan ekowisata melalui promosi dan peningkatan partisipasi stakeholder terhadap pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi sementara penelitian ini menggunakan metode survei dalam pengumpulan data. Selain itu dalam Penelitian ini lebih memberikan pemahaman tentang potensi ekowisata mangrove di Desa Pasar Banggi dengan memberikan rekomendasi dan strategi pengembangan ekowisata di Desa Pasar Banggi sementara penelitian penulis membahas tentang pengembangan ekowisata dengan latar belakang pelestarian hutan mangrove.

Berdasarkan uraian diatas, beberapa penelitian terdahulu tersebut belum menjelaskan tentang pengembangan ekowisata yang tidak hanya dilakukan mengutamakan keuntungan ekonomi, melainkan juga menjaga pelestarian, keseimbangan, kelangsungan, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam untuk masa kini dan mendatang.

Keterbaruan penelitian ini adalah studi tentang strategi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengembangkan ekowisata yang juga sebagai upaya menjaga kelestarian hutan mangrove, untuk itu studi ini dilakukan dengan memperhatikan implementasi dari prinsip-prinsip ekowisata

¹⁸Ghea Ken joendani dkk (2019), *kajian potensi pengembangan ekowisata sebagai upaya konservasi di Desa Pasar Banggi, Kabupaten Rembang*,. Journal of marine research vol.8, hlm : 117-126., diunduh dari <https://garuda.kemendikbud.go.id>, pada 22 November 2021 pukul 19:07

yang berkenaan dengan strategi pengembangan wisata ekologi yang berwawasan lingkungan yang meliputi prinsip pelestarian, prinsip keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah, prinsip partisipasi masyarakat, prinsip edukasi bagi masyarakat dan wisatawan serta prinsip wisata itu sendiri. Kemudian studi ini juga menjelaskan bagaimana langkah optimalisasi untuk memaksimalkan pengembangan ekowisata mangrove Pangkal Babu supaya lebih maju dan dapat dikenal secara luas serta upaya menjaga kelestarian kawasan mangrove yang menjadi daya tarik utama ekowisata ini dapat terus dilaksanakan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Strategi pemerintah dalam Mengembangkan Ekowisata Sebagai Bentuk Pelestarian Hutan Mangrove (Studi di Desa Tungkal I Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pengembangan ekowisata dalam upaya pelestarian hutan mangrove di Desa Tungkal I?
2. Bagaimana mewujudkan optimalisasi pengembangan ekowisata dalam upaya pelestarian hutan mangrove?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan ekowisata dalam upaya pelestarian hutan mangrove di Desa Tungkal I
2. Untuk mengetahui Bagaimana cara mewujudkan optimalisasi pengembangan ekowisata dalam upaya pelestarian hutan mangrove

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan atau sebagai bahan informasi untuk berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan ekowisata yang juga sebagai upaya menjaga kelestarian hutan mangrove
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat dijadikan sebagai suatu bahan bacaan tentang konsep pengembangan ekowisata dengan mengutamakan prinsip pelestarian.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang menggeser dominasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Pergeseran ini memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahannya serta meningkatkan pembangunan di daerahnya.

Sejak dicanangkannya otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 dan kemudian diperbarui lagi melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, pembangunan di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar bagi Pemerintah Kota, Kabupaten dan Provinsi untuk dapat menjalankan kebijakan pembangunan sektoral, wilayah dan daerah secara otonom yang didasarkan pada potensi sumber daya di daerahnya masing-masing. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Pengembangan pariwisata merupakan suatu aspek yang menjadi perhatian daerah melalui pemberian kewenangan dengan diterapkannya otonomi daerah. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata yang terdapat dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten memiliki wewenang dalam pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan pengelolaan destinasi pariwisata baik yang ada di Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.²¹ Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat mengelola dan mengatur serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di daerahnya. Sumber-sumber penerimaan PAD yang memberikan sumbangan dalam meningkatkan daerah salah satunya adalah Retribusi daerah dari pendapatan di sektor pariwisata, selain itu pembangunan

²⁰Teguh Adiprasetyo (2010)*Rancang bangun kebijakan pengelolaan taman nasional secara berkelanjutan di era otonomi daerah*, Sekolah pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, hlm 1

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pariwisata yang utama diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas infrastruktur pendukung yang memberikan peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 1.2
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Kepariwisata

| No | Sub Urusan | Daerah Kabupaten/Kota |
|----|--|---|
| 1 | Destinasi Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi |
| 2 | Pemasaran Pariwisata | Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota |
| 3 | Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif |
| 4 | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan. |

Sumber : Undang-undang Pemerintah Daerah, no 23 tahun 2014 dalam Riparkab Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan kebijakan umum pengembangan ekowisata dilakukan dalam kerangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem. Pengembangan ekowisata merupakan bentuk kreativitas daerah dalam menggunakan kewenangannya terhadap konservasi

lingkungan hal ini terkait dengan pengembangan ekowisata di daerah yang merupakan bentuk pemanfaatan asas desentralisasi dengan kreatifitas daerah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah serta memajukan sosial ekonomi masyarakat sekitar ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem hutan mangrove. Dalam hal ini otonomi daerah memberikan konsekuensi bahwa pemerintah pusat tidak lagi menjadi satu-satunya institusi yang bertanggung jawab dalam mengelola kawasan konservasi, pemerintah daerah dan masyarakat lokal dapat mempunyai peran yang lebih besar dalam mendukung efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

1.5.2 Strategi

Menurut Itamar strategi adalah sekumpulan cara secara keseluruhan yang dilakukan oleh lembaga, instansi ataupun organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan melihat peluang dan ancaman secara eksternal, menggunakan kemampuan internal dan sumber daya untuk mencapainya dengan rencana cermat untuk mencapai sebuah sasaran khusus.²²

Menurut Suryono strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata

²²Sri Puspita Dewi (2017) Skripsi, *Strategi pengembangan objek wisata dan kontribusinya terhadap penerimaan retribusidaerah di kabupaten Boyolali*, (Universitas Negeri Semarang.), hlm 44

daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.²³

1.5.3 Ekowisata

Ekowisata merupakan salah satu teknik pengembangan yang berkelanjutan dan sebuah usaha untuk menjaga kelestarian kawasan lindung dengan menerapkan peluang ekonomi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pengembangan dalam ekowisata juga bertujuan agar memberikan dukungan terhadap pelestarian lingkungan alam dan pelestarian budaya, sehingga dapat menumbuhkan minat peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.²⁴

The International Ecotourist Society (TIES) pada tahun 2015 menjelaskan pengertian ekowisata sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke tempat-tempat alami, yang mendukung upaya pelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.²⁵

Strategi megembangkan ekowisata perlu memperhatikan prinsip ekowisata, seperti yang dikemukakan Murianto yaitu :

1. mencegah dan menanggulangi dampak dan aktifitas wisatawan terhadap bentang alam dan budaya masyarakat lokal,
2. mendidik dan menyadarkan wisatawan serta masyarakat lokal tentang pentingnya konservasi,
3. mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelolaan kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan, retribusi dan pajak konservasi

²³Febrianti Dwi Cahya, Mardiyono, Stefanus Fani Rengu (2014), *Strategi Pengembangan pariwisata oleh pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah*, Jurnal administrasi publik Vol 2, No 2, hlm 327

²⁴Alamuddin (2021)*Peran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian jasa lingkungan di kawasan wisata alam Simarjarunjung Kabupaten Simalungin Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara hlm 11

²⁵Gunardi Djoko Winarto dan Sugeng Prayitno Harianto (2017), *Ekowisata*, Bandar Lampung : Pustaka Media, hlm. 17

dapat digunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian, 4. masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan ekowisata, 5. keuntungan ekonomi yang diperoleh secara nyata harus dapat mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kawasan pesisir dan laut, 6. semua upaya pengembangan, termasuk pengembangan fasilitas pendukung harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam, 7. pembatasan pemenuhan permintaan, karena umumnya daya dukung ekosistem secara alamiah lebih rendah daripada daya dukung ekosistem buatan, 8. devisa dan belanja wisatawan dialokasikan secara proporsional dan asil untuk pemerintah pusat dan daerah.²⁶

1.5.4 Pengembangan Ekowisata

Menurut Pitana dalam Yoeti, pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya pariwisata mengintegritaskan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pariwisata.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata adalah upaya pemanfaatan potensi alam dan budaya, dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian. Pengembangan pariwisata juga merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana yang menggali, memperbaiki dan memajukan potensi yang ada disuatu daerah tujuan wisata baik secara fisik maupun secara sosial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat meupun devisa negara dengan melestarikan identitas budaya dan meminimalkan dampak negatifnya.

²⁶Murianto, Lalu Masyudi (2018) *Strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat lokal di teluk Seriwe Lombok Timur*, Jurnal media bina ilmiah Vol 13, No 2, hlm 915

²⁷Oka A. Yoeti (2016)*Perencanaan dan pengembangan pariwisata*, Jakarta : Pradnya Paramida hlm 9

Pengembangan ekowisata harus memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dan kepentingan masyarakat. Menurut *Indonesian Ecotourism Network*(1996) prinsip pariwisata harus menekankan pada tiga aspek dasar yaitu,²⁸

1. Prinsip konservasi, berupa pengembangan ekowisata yang harus mampu memelihara, melindungi dan/atau berkontribusi untuk memperbaiki sumberdaya alam,
2. Prinsip partisipasi masyarakat, yaitu pengembangan ekowisata harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat di sekitar kawasan
3. Prinsip ekonomi, yang mengharuskan pengembangan ekowisata mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat setempat, dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang masih alami dapat mengembangkan pembangunan yang berimbang (*balanced development*) antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan kepentingan semua pihak.

Sementara dalam penerapan ekowisata dapat mencerminkan dua prinsip yaitu²⁹, prinsip edukasi, berupa pengembangan ekowisata yang harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggungjawab dan komitmen terhadap

²⁸Gunardi Djoko Winarno, Sugeng Prayitno Harianto (2017), *Ekowisata*, Bandar Lampung : Pusaka Media, hlm : 20

²⁹*ibid.*

pelestarian lingkungan dan budaya. dan Prinsip wisata, yakni pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan dan memberikan pengalaman yang orisinal kepada pengunjung, serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.

1.5.5 Pelestarian

Pelestarian dalam pengembangan ekowisata merupakan bagian prinsip ekowisata dalam bentuk wisata yang menekankan tanggung jawab terhadap kelestarian alam, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat.

Ini sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam panduan dasar pelaksanaan ekowisata di Indonesia yang mengacu pada 5 prinsip dasar yaitu.³⁰

1. Pelestarian

Kegiatan wisata yang dihadirkan tidak bersifat merusak kelestarian alam dan kebudayaan lokal. Baik dari segi aktivitas maupun pengelolaannya.

2. Pendidikan

Kegiatan pariwisata yang dilakukan sebaiknya memberikan unsur pendidikan seperti informasi mengenai keanekaragaman hayati serta adat istiadat masyarakat lokal. Hal ini diharapkan dapat mendorong para wisatawan untuk ikut menjaga kekayaan yang ada.

3. Pariwisata

³⁰Sukawati Zalukho (2009), *Ekowisata: Panduan dasar pelaksanaan* , UHJAK, hlm 18-

Pariwisata merupakan aktivitas yang mengandung unsur kesenangan dan motivasi bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Ekowisata harus mengandung unsur ini agar diterima pasar dan layak jual.

4. Ekonomi

Ekowisata yang dijalankan harus memberikan keuntungan dan profit baik untuk pengelola maupun masyarakat setempat agar aktivitas ini dapat terus berjalan. Penghasilan yang didapat dari ekowisata, dapat didistribusikan untuk pelestarian tingkat lokal dan untuk pengembangan pengetahuan masyarakat setempat.

5. Partisipasi

Kegiatan wisata diarahkan pada keterlibatan langsung antara wisatawan, masyarakat lokal dan pengelola dalam melestarikan alam dan budaya lokal sehingga terjadi interaksi dan pertukaran informasi yang lebih cepat.

Selain itu ada tujuh hal penting dalam pelestarian ekowisata yang harus dilakukan oleh pengelola ekowisata dalam upaya mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan sebagaimana yang disebutkan oleh *The Ecotravel Center* (2002) yaitu; (1) mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dijadikan sebagai obyek ekowisata, (2) meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan di sekitar obyek ekowisata dan mendukung program pembangunan berkelanjutan, (3) pengurangan konsumsi terhadap sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, (4) melestarikan kearifan-kearifan

lokal yang dimiliki oleh masyarakat lokal, (5) mengutamakan usaha-usaha pendukung kegiatan ekowisata yang dimiliki oleh masyarakat lokal, (6) mendukung usaha-usaha pelestarian lingkungan, dan (7) memberikan kontribusi terhadap pelestarian biodiversitas yang ada di lingkungan yang dijadikan sebagai obyek ekowisata.³¹

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

“Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuinsinya, kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan”³²

Pelestarian lingkungan melalui ekowisata memberikan dampak positif dalam pengembangan suatu kawasan. Dampak positif tersebut tentunya harus diimbangi dengan upaya perlindungan alam secara terus menerus sehingga akan menjadi daya tarik bagi para pengunjung atau wisatawan. Ekowisata dengan konsep konservasi menitikberatkan pada pengembangan ekowisata yang ramah lingkungan, dimana pengembangan ekowisata harus mengutamakan pemeliharaan dan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Prinsip pengelolaan ekowisata yang dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam Standar nasional Indonesia tentang Pengelolaan Wisata Alam telah menjelaskan prinsip perlindungan dan konservasi alam yaitu berupa pengembangan yang harus memperhatikan

³¹I Nengah Subadra. (2007). *Bali Tourism watch: ekowisata sebagai wahana pelestarian alam* <http://www.subadra.wordpress.com>, diakses pada 18 November 2021 pk1 09:12

³²Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

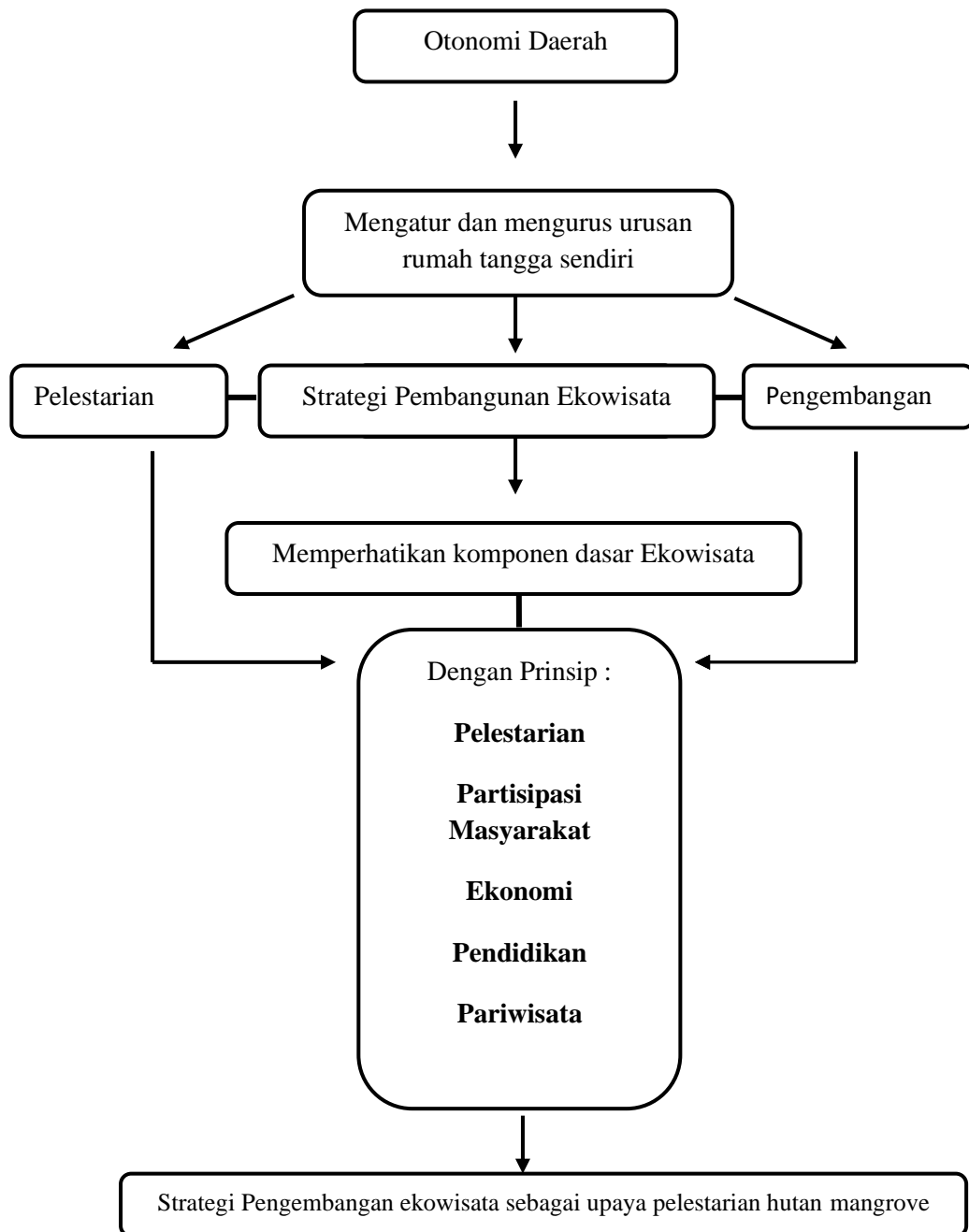
kelestarian fungsi ekosistem, kelestarian objek daya tarik wisata alam, kelestarian sosial budaya masyarakat, kepuasan, keselamatan, dan kenyamanan pengunjung dan juga adanya prinsip manfaat ekonomi.³³

Kegiatan ekowisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus tetap menjaga pelestarian lingkungan hingga masa mendatang. Drumm dalam Chandra Eko Wahyudi Utomo menyatakan ada enam keuntungan dalam implementasi kegiatan ekowisata terkait pelestarian alam yaitu: (1) memberikan nilai ekonomi dalam kegiatan ekosistem di lingkungan yang dijadikan sebagai objek wisata, (2) menghasilkan keuntungan secara langsung untuk pelestarian lingkungan, (3) memberikan keuntungan secara langsung dan tidak langsung bagi para stakeholders, (4) membangun konsituensi untuk konservasi secara lokal, nasional, dan internasional, (5) mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, (6) mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang ada di objek wisata tersebut.³⁴

³³Maya Pattiweel (2018)*Konsep pengembangan ekowisata berbasis konservasi di Kampung Malagufuk Kabupaten Soeong*. Journal of dedication to Papua community, Vol.1, No.1

³⁴Chandra Eko Wahyudi Utomo (2017)*Pariwisata dan pembangunan*, Jember : Upt penerbitan Universitas Jember, hlm 250

1.6 Kerangka Berfikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data objektif dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana pengembangan ekowisata sebagai upaya perlindungan hutan mangrove di Desa Tugkal Satu.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa lokasi penelitian untuk dapat melengkapi sumber data yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata sebagai upaya pelestarian hutan mangrove di Desa Tugkal Satu, yaitu BAPPEDA Tanjung Jabung barat, kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tanjung Jabung Barat, kantor Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat serta objek Ekowisata Pangkal Babu yang berada di Desa Tugkal Satu kecamatan Tugkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam menentukan fokus penelitian, disini peneliti memfokuskan penelitian dari segi pengembangan dan pelestarian ekowisata sebagai upaya pelestarian hutan mangrove yang ada di area ekowisata Pangkal Babu Desa Tugkal Satu.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu bentuk yang bisa memberikan sumber informasi mengenai data. Para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber. Dalam penelitian ini data yang digunakan dapat diperoleh dari :

a) Data Primer

Data primer merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian dengan melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melakukan pengamatan yang dilakukan sendiri peneliti.³⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tanjung Jabung Barat dan masyarakat yang mengelola area ekowisata mangrove Pangkal Babu.

b) Data Sekunder

Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Sumber data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, internet dan sebagainya yang dibutuhkan dalam data penelitian yang dilakukan.³⁶ Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen terkait pengembangan ekowisata, halaman *website* Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat, skripsi

³⁵Lexy J. Moleong (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm 158

³⁶*Ibid.* hlm 159

yang masih terkait dengan topik penelitian dan informasi yang didapatkan dari media *online* di internet.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap tahu tentang informasi yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.³⁷Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan penelitian yaitu :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tanjung Jabung Barat
- b. Kabid destinasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tanjung Jabung Barat
- c. Kabid pelestarian Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat
- d. Kepala Desa Tungkal Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- e. Tokoh masyarakat di tempat wisata, Desa Tungkal 1
- f. Lsm yang bergerak dalam perlingungan mangrove
- g. Pemuda di Desa Tungkal Satu

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

³⁷Sugiyono (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabeta, hlm 224

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.³⁸ Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi nonpartisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata mangrove di Desa Tungkal Satu. Pelaksanaan observasi akan dilakukan secara langsung oleh peneliti secara langsung kelapangan minimal 1 kali, jumlah ini akan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan.

b) Wawancara atau *Interview*

merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang ada pada metode penelitian kualitatif, wawancara ini terbagi menjadi dua jenis yaitu, wawancara terstruktur dalam mengumpulkan data penelitian yang bisa dipergunakan dengan terstruktur dimana keduanya dapat digunakan

³⁸*Ibid* . hlm 226

sesuai dengan keadaan penelitian.³⁹ Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara ini terbagi menjadi dua jenis yaitu, wawancara tidak terstruktur dan terstruktur yang mana keduanya dapat digunakan sesuai dengan keadaan penelitian.

Adapun yang menjadi Data informan utama penelitian yaitu :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) (1 orang)
 - b. Kabid destinasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tanjung Jabung Barat (1 orang)
 - c. Kabid pelestarian Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat (1 orang)
 - d. Tokoh masyarakat di tempat wisata, Desa Tungkal 1 (1orangg)
 - e. Kepala Desa Tungkal 1 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (1 Orang)
 - f. Lsm yang bergerak dalam perlingungan mangrove (1 orang)
 - g. Pemuda di Desa Tungkal Satu (1 orang)
- c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁴⁰ Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa lampau secara historis. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku pendapat, teori, dalil-

³⁹ Muri Yusuf (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian gabungan* Jakarta :Kencana . hlm. 380.

⁴⁰Iriyana dan Risti Kawasati (2018) *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*:<https://osf.io/cy9de/download/formatpdf>, diakses Pada tanggal 3November 2021. Pkl 11:30

dalil atau hukum-hukum dan lainya seperti foto, video, koran, majalah, berhubungan dengan objek penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian dipdukan untuk mencari dan menemukan pola tentang apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disimpulkan sebagai hasil penelitian.⁴¹

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi adalah memilih data atau informasi hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh di lapangan mengenai pengembangan ekowisata sebagai upaya pelestarian hutan mangrove yang didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dirangkum, dipilih dan difokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya penyajian data adalah menampilkan atau memaparkan data (informasi) yang diperoleh dalam proses pengumpulan data, dalam penelitain ini data hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi dan bagan yang menjelaskan data melalui penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu agar

⁴¹Lexy J. Moleong (2006)*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm 248

mudah dipahami. Terakhir penarikan kesimpulan yang merupakan proses analisis data atau informasi yang kemudian bermuara pada penarikan kesimpulan penelitian. Pada proses ini peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dari data-data tersebut sesuai dengan fokus kajian.

1.7.8 Keabsahan Data

Triangulasi merupakan metode pengujian keabsahan atau kebenaran suatu data hasil penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda atau bervariasi.⁴² Adapun triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu triangulasi yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa sumber informasi berbeda untuk menguji kebenaran data mengenai fenomena tertentu di lapangan. Triangulasi ini dilakukan dengan mengecek beberapa perbandingan yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

⁴²*Ibid.* Hlm 330